1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Laporan ini menyajikan capaian pelaksanaan pengendalian inflasi di Kabupaten Bandung selama periode April hingga Juni (Triwulan II) Tahun 2026. Upaya pengendalian difokuskan pada pemantauan harga dan ketersediaan pangan, stabilisasi harga dan pasokan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), penyaluran Minyakita dan beras SPHP, penguatan produksi komoditas hortikultura, serta dukungan terhadap kelancaran distribusi dan koordinasi pengendalian inflasi. Pelaksanaan kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung keterjangkauan harga, menjaga ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi, serta memperkuat komunikasi dan koordinasi dalam pengendalian inflasi di Kabupaten Bandung.

1. April 2026

Pada April 2026, Kabupaten Bandung mengalami deflasi sebesar 0,03 persen secara month-to-month (mtm) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,70. Inflasi tahun kalender (ytd) tercatat sebesar 1,38 persen, sedangkan inflasi year-on-year (yoy) sebesar 2,49 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi mtm adalah cabai rawit, telur ayam ras, emas perhiasan, daging ayam ras, dan buah naga.

Berdasarkan kelompok pengeluaran secara mtm, kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil deflasi sebesar 0,12 persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,02 persen, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,05 persen. Sementara itu, kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga memberikan andil inflasi 0,02 persen, perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,04 persen, transportasi 0,01 persen, serta penyediaan makanan dan minuman/restoran 0,09 persen.

2. Pada Mei 2026, Kabupaten Bandung mengalami inflasi sebesar 0,14 persen secara month-to-month (mtm) dengan IHK sebesar 111,86. Inflasi tahun kalender (ytd) tercatat sebesar 1,52 persen, sedangkan inflasi year-on-year (yoy) sebesar 3,01 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi mtm adalah minyak goreng, cabai rawit, cabai merah, bawang merah, dan susu cair kemasan.

Berdasarkan kelompok pengeluaran secara month-to-month (mtm), kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 0,07 persen dan memberikan andil sebesar 0,02 persen terhadap inflasi Kabupaten Bandung pada Mei 2026. Kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga memberikan andil inflasi sebesar 0,03 persen, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,06 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,02 persen, kelompok transportasi sebesar 0,05 persen, serta kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,02 persen. Sementara itu, kelompok pakaian dan alas kaki serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya memberikan andil deflasi masing-masing sebesar 0,04 persen dan 0,02 persen.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa tekanan inflasi pada Mei 2026 terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, khususnya minyak goreng serta komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang merah.

3. Juni 2026

Pada Juni 2026, Kabupaten Bandung mengalami inflasi sebesar 0,25 persen secara month-to-

month (mtm) dengan IHK sebesar 112,14. Inflasi tahun kalender (ytd) mencapai 1,78 persen, sedangkan inflasi year-on-year (yoy) sebesar 3,03 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi mtm adalah bensin, bawang merah, beras, wortel, dan tomat.

Berdasarkan kelompok pengeluaran secara month-to-month (mtm), tekanan inflasi pada Juni 2026 terutama berasal dari kelompok transportasi yang mengalami inflasi sebesar 2,42 persen dengan andil sebesar 0,21 persen. Kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran memberikan andil sebesar 0,07 persen, diikuti kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,03 persen, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,02 persen, serta kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,01 persen. Sebaliknya, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami deflasi sebesar 0,19 persen dengan andil deflasi sebesar 0,07 persen.

Kondisi Juni menunjukkan bahwa inflasi bulanan tidak hanya dipengaruhi oleh pangan. Kelompok transportasi menjadi sumber tekanan terbesar, sementara pada saat yang sama beberapa komoditas pangan, seperti bawang merah, beras, wortel, dan tomat tetap tercatat sebagai komoditas dominan penyumbang inflasi mtm. Hal ini menunjukkan perlunya melihat inflasi secara utuh berdasarkan kelompok pengeluaran sekaligus pergerakan komoditas.

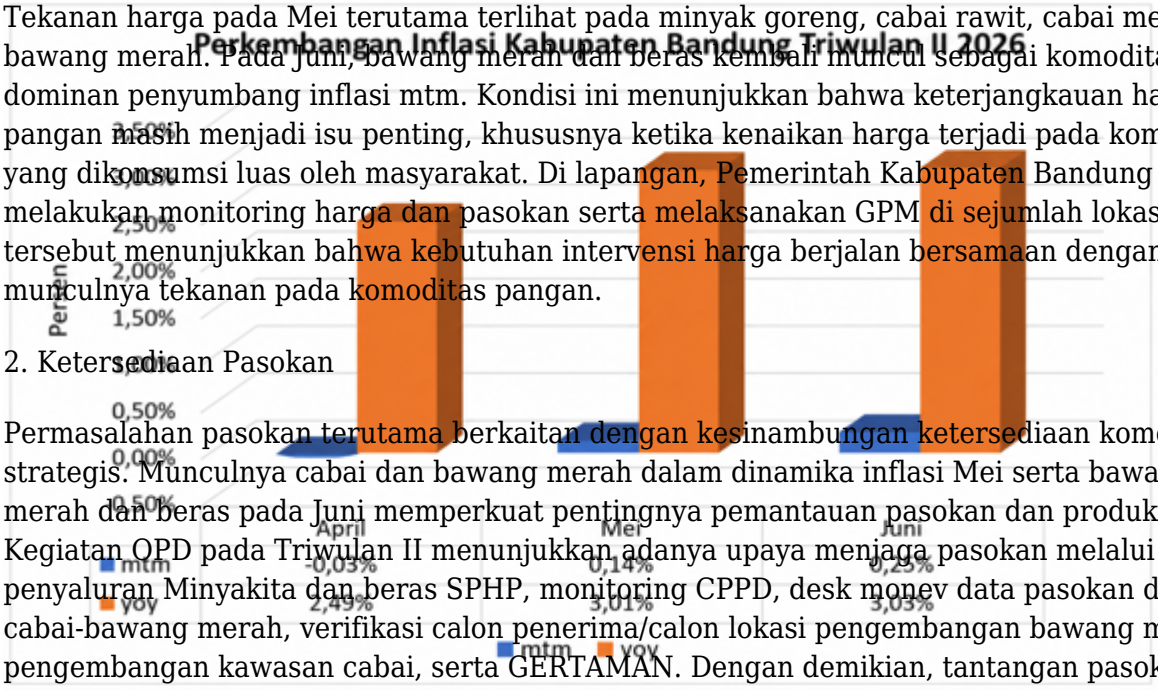
Bulan	IHK	mtm (%)	ytd (%)	yoy (%)	Komoditas dominan mtm
April	111,70	-0,03	1,38	2,49	Cabai rawit, telur ayam ras, emas perhiasan, daging ayam ras, buah naga (deflasi)
Mei	111,86	0,14	1,52	3,01	Minyak goreng, cabai rawit, cabai merah, bawang merah, susu cair kemasan
Juni	112,14	0,25	1,78	3,03	Bensin, bawang merah, beras, wortel, tomat

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Identifikasi permasalahan Triwulan II disusun dengan menghubungkan perkembangan inflasi BPS dengan kondisi yang dihadapi serta kegiatan nyata OPD Kabupaten Bandung. Pendekatan ini digunakan agar permasalahan yang dirumuskan tidak berhenti pada perubahan angka inflasi, tetapi dapat ditelusuri terhadap aspek harga, pasokan, distribusi, dan koordinasi yang menjadi ruang intervensi TPID.

1. Keterjangkauan Harga

Tekanan harga pada Mei terutama terlihat pada minyak goreng, cabai rawit, cabai merah, dan bawang merah. Pada Juni, bawang merah dan beras kembali muncul sebagai komoditas dominan penyumbang inflasi mtm. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterjangkauan harga pangan masih menjadi isu penting, khususnya ketika kenaikan harga terjadi pada komoditas yang dikonsumsi luas oleh masyarakat. Di lapangan, Pemerintah Kabupaten Bandung telah melakukan monitoring harga dan pasokan serta melaksanakan GPM di sejumlah lokasi. Fakta tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan intervensi harga berjalan bersamaan dengan munculnya tekanan pada komoditas pangan.



2. Ketersediaan Pasokan

Permasalahan pasokan terutama berkaitan dengan kesinambungan ketersediaan komoditas strategis. Munculnya cabai dan bawang merah dalam dinamika inflasi Mei serta bawang merah dan beras pada Juni memperkuat pentingnya pemantauan pasokan dan produksi. Kegiatan OPD pada Triwulan II menunjukkan adanya upaya menjaga pasokan melalui penyaluran Minyakita dan beras SPHP, monitoring CPPD, desk monev data pasokan dan harga cabai-bawang merah, verifikasi calon penerima/calon lokasi pengembangan bawang merah, pengembangan kawasan cabai, serta GERTAMAN. Dengan demikian, tantangan pasokan tidak hanya terkait stok di pasar, tetapi juga kesinambungan produksi dari sisi hulu.

3. Kelancaran Distribusi

Kelancaran distribusi menjadi penting karena ketersediaan komoditas di tingkat produksi belum otomatis menjamin ketersediaan pada tingkat konsumen. Penyaluran Minyakita dan beras SPHP ke Pasar Sehat Soreang, pelaksanaan GPM, verifikasi kios pangan, serta Gelar/Pasar Tani menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat saluran distribusi dan memperpendek akses dari penyedia atau produsen kepada konsumen. Selain itu, meningkatnya andil kelompok transportasi pada Juni memperkuat pentingnya pemantauan faktor distribusi dan mobilitas barang.

4. Komunikasi Efektif

Perubahan sumber tekanan inflasi dari bulan ke bulan memerlukan koordinasi yang responsif dan berbasis pada perkembangan data terkini. Selama Triwulan II Tahun 2026, koordinasi pengendalian inflasi dilaksanakan melalui Rakor Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah, koordinasi antar daerah, koordinasi ketahanan pangan, serta kegiatan monitoring bersama antar-OPD. Pelaksanaan koordinasi tersebut menjadi sarana untuk menyelaraskan informasi mengenai perkembangan harga, kondisi pasokan, produksi, dan distribusi sebagai dasar dalam menentukan langkah pengendalian inflasi. Ke depan, efektivitas koordinasi perlu terus diperkuat agar hasil pemantauan dapat ditindaklanjuti secara lebih terarah sesuai dengan komoditas dan kondisi yang memerlukan intervensi.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi Kabupaten Bandung selama Triwulan II Tahun 2026 dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yang mendukung strategi 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh perangkat daerah bersama mitra terkait dalam mendukung stabilisasi harga, menjaga ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi, serta memperkuat koordinasi pengendalian inflasi daerah.

1. Keterjangkauan Harga

Pada aspek keterjangkauan harga, Pemerintah Kabupaten Bandung melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) serta monitoring harga dan ketersediaan pangan sebagai bagian dari upaya menjaga akses masyarakat terhadap pangan dengan harga yang terjangkau. Selama Triwulan II Tahun 2026, GPM dilaksanakan di sejumlah wilayah, antara lain Desa Ganjar Sabar Kecamatan Nagreg pada 28 April, Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu pada 6 Mei, Kecamatan Cileunyi pada 21 Mei, serta GPM Serentak se-Jawa Barat di halaman Kantor Samsat Kecamatan Soreang pada 22 Mei. Pelaksanaan GPM berlanjut pada Juni, antara lain di Pondok Pesantren Al Hussaeni Kecamatan Ciparay pada 16 Juni dan Desa Tegalluar Kecamatan Bojongsoang pada 27 Juni 2026. Selain itu, monitoring harga, ketersediaan, dan keamanan pangan juga dilaksanakan menjelang Hari Raya Idul Adha pada 19 Mei 2026.

Pelaksanaan GPM dan monitoring tersebut menjadi bagian dari upaya pengendalian harga pangan selama Triwulan II, terutama dalam menjaga keterjangkauan komoditas kebutuhan pokok bagi masyarakat serta merespons perkembangan harga yang terjadi di pasar.

2. Ketersediaan Pasokan

Pada aspek ketersediaan pasokan, Disperdagin bersama Perum BULOG menyalurkan Minyakita ke Pasar Sehat Soreang, antara lain 220 dus pada 2 April, 180 dus pada 14 April, 600 dus pada 20 April, serta 130 dus masing-masing pada 14 Mei dan 25 Mei. Beras SPHP disalurkan sebanyak 6 ton pada 14 Mei dan 6 ton pada 20 Mei 2026 di Pasar Sehat Soreang melalui kerja sama Disperdagin dengan Perum BULOG.

Dari sisi produksi, Dinas Pertanian melaksanakan desk monev data pasokan dan harga cabai serta bawang merah pada 2 April, verifikasi calon penerima/calon lokasi kegiatan bawang merah di Kelompok Tani Tricipta Kecamatan Cimenyan pada 30 April, penanaman 1.000 pohon dan pendampingan kawasan cabai di Desa Mekarmanik Kecamatan Cimenyan pada 22 Mei, pendampingan teknis kawasan cabai pada 5 Juni, serta persiapan dan launching GERTAMAN di Kecamatan Pameungpeuk pada 2 dan 22 Juni. Rangkaian tersebut menunjukkan respons dari sisi hulu terhadap komoditas hortikultura yang mengalami tekanan harga pada Triwulan II.

3. Kelancaran Distribusi

Pada aspek kelancaran distribusi, Pemerintah Kabupaten Bandung melaksanakan verifikasi dan validasi kios pangan di Kecamatan Ciparay pada 28 April untuk memastikan kelayakan operasional, ketersediaan komoditas, dan kesiapan kios. Gelar/Pasar Tani PASTI PUAS juga dilaksanakan secara berkala selama April–Juni sebagai sarana pemasaran hasil pertanian secara lebih langsung kepada konsumen. Penyaluran SPHP, Minyakita, dan pelaksanaan GPM pada berbagai lokasi turut berfungsi memperkuat akses distribusi pangan kepada masyarakat.

4. Komunikasi Efektif

Komunikasi efektif dalam pengendalian inflasi dilaksanakan melalui koordinasi secara berkala yang melibatkan perangkat daerah terkait. Selama Triwulan II Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Bandung mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah yang dilaksanakan secara rutin setiap minggu sebagai forum untuk membahas perkembangan inflasi, kondisi harga dan ketersediaan pasokan, serta langkah pengendalian yang perlu dilakukan di daerah. Rakor tersebut diikuti oleh perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung sebagai bagian dari koordinasi dan tindak lanjut pengendalian inflasi. Selain rakor rutin tersebut, koordinasi juga dilakukan melalui kegiatan lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pengendalian inflasi. Pelaksanaan koordinasi secara berkala tersebut mendukung penyelarasan informasi dan langkah pengendalian inflasi di Kabupaten Bandung.

5. Keterkaitan Perkembangan Inflasi dengan Kegiatan OPD

Perkembangan/Kondisi	**Bukti Kegiatan OPD Triwulan II**	**Keterkaitan 4K**
Minyak goreng menjadi salah satu komoditas dominan penyumbang inflasi mtm pada Mei	Penyaluran Minyakita bersama Perum BULOG, pelaksanaan GPM, serta monitoring harga dan ketersediaan pangan	K1–K2 – Mendukung keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan
Cabai rawit dan cabai merah menjadi komoditas dominan penyumbang inflasi mtm pada Mei	Desk monev data pasokan dan harga cabai-bawang merah, pengembangan dan pendampingan kawasan cabai, serta penanaman 1.000 pohon	K2 – Mendukung penguatan produksi dan kesinambungan pasokan

Bawang merah menjadi salah satu komoditas dominan penyumbang inflasi mtm pada Mei dan Juni	Desk monev data pasokan dan harga cabai-bawang merah serta verifikasi calon penerima/calon lokasi (CPCL) kegiatan bawang merah di Kecamatan Cimenyan	K2 – Mendukung pengembangan produksi dan ketersediaan pasokan bawang merah
Beras menjadi salah satu komoditas dominan penyumbang inflasi mtm pada Juni	Penyaluran beras SPHP bersama Perum BULOG di Pasar Sehat Soreang sebanyak 6 ton pada 14 Mei dan 6 ton pada 20 Mei 2026, serta pelaksanaan GPM	K1–K2 – Mendukung keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan beras
Kelompok transportasi menjadi salah satu sumber tekanan inflasi pada Juni	Pengawasan angkutan barang serta kegiatan yang mendukung kelancaran distribusi pangan	K3 – Mendukung kelancaran distribusi dan pergerakan barang
Sumber tekanan inflasi mengalami perubahan antarbulan selama Triwulan II	Rakor Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah serta koordinasi lintas OPD dan pemangku kepentingan	K4 – Mendukung koordinasi, pertukaran informasi, dan penyelarasan langkah pengendalian inflasi

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Secara umum, pelaksanaan pengendalian inflasi Kabupaten Bandung pada Triwulan II Tahun 2026 telah mencakup empat strategi 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Pada April, ketika Kabupaten Bandung mengalami deflasi secara mtm, pelaksanaan kegiatan pengendalian tetap diarahkan pada upaya menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi. Memasuki Mei, ketika minyak goreng, cabai, dan bawang merah menjadi komoditas dominan penyumbang inflasi mtm, Pemerintah Kabupaten Bandung melaksanakan berbagai kegiatan antara lain penyaluran Minyakita, GPM, monitoring harga dan pasokan, serta kegiatan yang mendukung pengembangan cabai dan bawang merah.

Pada bulan Juni, tekanan inflasi menunjukkan perkembangan yang lebih beragam. Selain sejumlah komoditas pangan, kelompok transportasi memberikan andil yang cukup besar terhadap inflasi mtm. Pada periode yang sama, Pemerintah Kabupaten Bandung melaksanakan kegiatan yang mendukung kelancaran distribusi melalui pengawasan angkutan barang, Gelar/Pasar Tani, GPM, serta koordinasi lintas perangkat daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengendalian inflasi perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui stabilisasi harga pangan, tetapi juga dengan menjaga pasokan dan kelancaran distribusi.

Dari sisi pelaksanaan, berbagai kegiatan telah menghasilkan output berupa penyaluran pasokan pangan, pelaksanaan GPM, monitoring harga dan ketersediaan pangan, penguatan saluran distribusi, pendampingan produksi hortikultura, serta koordinasi pengendalian inflasi. Namun, perubahan tingkat inflasi tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan satu kegiatan tertentu karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Oleh karena itu, evaluasi selanjutnya perlu memperkuat pengukuran hasil kegiatan melalui perkembangan harga, volume penyaluran, cakupan lokasi dan penerima manfaat, kondisi pasokan, serta capaian kegiatan yang dapat diverifikasi.

Strategi 4K	Permasalahan/Perkembangan	Intervensi	Output	Evaluasi

Keterjangkauan Harga	Tekanan harga pangan pada Mei terutama berasal dari minyak goreng, cabai, dan bawang merah	GPM dan monitoring harga serta ketersediaan pangan	GPM dan monitoring terlaksana di sejumlah lokasi	Pelaksanaan GPM dan monitoring telah mendukung upaya stabilisasi harga; pelaksanaannya perlu terus disesuaikan dengan perkembangan harga dan komoditas prioritas
Ketersediaan Pasokan	Perkembangan harga cabai dan bawang merah pada Mei serta beras pada Juni menunjukkan pentingnya menjaga ketersediaan komoditas pangan	Penyaluran SPHP dan Minyakita, pengembangan kawasan cabai, verifikasi CPCL bawang merah, dan GERTAMAN	SPHP disalurkan masing-masing 6 ton pada 14 Mei dan 20 Mei; penyaluran Minyakita dan kegiatan penguatan produksi hortikultura terlaksana	Intervensi telah mencakup sisi pasokan dan produksi; kesinambungan pasokan serta perkembangan hasil kegiatan produksi perlu terus dipantau
Kelancaran Distribusi	Kelancaran distribusi menjadi bagian penting dalam menjaga ketersediaan komoditas di tingkat konsumen	Kios Pangan, Gelar/Pasar Tani, GPM, penyaluran pangan, dan pengawasan angkutan barang	Kegiatan distribusi pangan dan pengawasan angkutan barang terlaksana	Perlu terus dilakukan pemantauan terhadap kelancaran distribusi dan ketersediaan komoditas di pasar
Komunikasi Efektif	Perubahan sumber tekanan inflasi antarbulan memerlukan koordinasi lintas sektor	Rakor pengendalian inflasi serta koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan	Koordinasi dan pertukaran informasi pengendalian inflasi terlaksana	Hasil koordinasi perlu ditindaklanjuti secara lebih terarah sesuai perkembangan komoditas, kondisi wilayah, perangkat daerah terkait, serta bentuk dan waktu pelaksanaan tindak lanjut

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Memperkuat pemantauan harga dan ketersediaan pasokan komoditas pangan strategis, terutama bawang merah, beras, minyak goreng, cabai, serta komoditas lainnya yang menunjukkan tekanan harga selama Triwulan II Tahun 2026, sebagai dasar dalam menentukan langkah pengendalian yang sesuai dengan perkembangan kondisi pasar.
2. Melanjutkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara terarahdengan mempertimbangkan perkembangan harga, komoditas yang mengalami tekanan, serta wilayah yang membutuhkan intervensi. Pelaksanaan GPM perlu didukung dengan pencatatan komoditas, volume penyaluran, harga, lokasi, dan penerima manfaat untuk mendukung evaluasi pelaksanaan kegiatan.
3. Menjaga kesinambungan ketersediaan beras SPHP dan Minyakitamelalui koordinasi dengan Perum BULOG dan mitra terkait, serta melakukan pemantauan terhadap volume penyaluran, ketersediaan stok, dan perkembangan harga pada pasar pantauan.
4. Memperkuat upaya peningkatan produksi dan ketersediaan komoditas hortikultura,

khususnya cabai dan bawang merah, melalui pendampingan kelompok tani/Champion, pengembangan kawasan produksi, verifikasi calon penerima dan calon lokasi (CPCL), serta pemantauan perkembangan produksi dan periode panen.

5. Memperkuat kelancaran distribusi panganmelalui optimalisasi Kios Pangan, Gelar/Pasar Tani, GPM, penyaluran pangan, serta pemantauan kelancaran angkutan barang guna mendukung ketersediaan komoditas dan akses pangan bagi masyarakat.
6. Memperkuat pemanfaatan dan integrasi data perkembangan inflasi, harga, pasokan, produksi, dan distribusi sebagai dasar identifikasi dini terhadap komoditas yang berpotensi mengalami tekanan harga serta dalam menentukan prioritas dan bentuk intervensi pengendalian inflasi.
7. Memperkuat tindak lanjut hasil Rakor TPID dan koordinasi pengendalian inflasidengan mengarahkan hasil pembahasan pada komoditas dan permasalahan prioritas, wilayah yang memerlukan perhatian, perangkat daerah terkait, serta bentuk dan waktu pelaksanaan tindak lanjut.